

MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT ADVOKASI PUBLIK

STUDI KASUS FACEBOOK INFO CEGATAN BLITAR SEBAGAI ALAT ADVOKASI KEBUTUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018-2020

Nova Christanty

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya

novachristanty16041184092@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tren advokasi kebijakan digital yang berhasil dilakukan oleh Facebook Info Cegatan Blitar (ICB). Hal ini dikarenakan untuk mencapai perubahan kebijakan publik dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis baik secara online maupun offline. ICB merupakan organisasi non politik yang menjalankan fungsi kontrol sosial yang tidak dapat diintervensi lembaga pemerintahan sekalipun. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses advokasi yang dilakukan ICB terhadap kebijakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) Kabupaten Blitar sejak tahun 2018. Subjek penelitian ini berjumlah lima informan dari berbagai latar belakang yang diwawancarai secara mendalam, selain itu peneliti melakukan observasi pada akun Facebook ICB. Penelitian ini memberi implikasi pada pergeseran kerangka konseptual advokasi media sosial pada teori media sosial tentang advokasi dan perubahan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, dalam mempengaruhi kebijakan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, ICB melalui beberapa tahap strategis mulai dari *critical awareness*, *building relationship*, *action*, *policy priorities shift* dan *controlling*. Tindakan pengurus ICB sebagai advokator berhasil mempengaruhi kebijakan pelayanan adminduk yang diwujudkan dengan empat program baru serta upaya perbaikan keterbukaan informasi publik mengenai persyaratan pengurusan adminduk. ICB memiliki kekuatan sekaligus strategi tekanan publik atau disebut *people power* yang memberikan efek desakan kepada pembuat kebijakan. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai advokasi kebijakan melalui media sosial, agar meneliti jenis media sosial lain seperti Twitter di lingkup negara Indonesia, karena setiap platform memiliki karakteristik serta keunikan tersendiri disamping itu, proses maupun pola advokasi yang terjadi akan juga berbeda.

Kata Kunci: Media Sosial, Advokasi Publik, Info Cegatan Blitar.

Abstract

This study discusses the digital policy advocacy trends that have been successfully carried out by Blitar's Info Cegatan Facebook (ICB). This is because achieving a change in public policy requires a series of systematic processes both online and offline. ICB is a non-political organization that carries out social control functions that cannot be intervened by government institutions. This research uses a case study method with a qualitative approach. The purpose of this study was to determine the advocacy process carried out by ICB on Blitar Regency's population administration service policy since 2018. The subjects of this study were five informants from various backgrounds who were interviewed in depth, in addition the researchers made observations on ICB's Facebook account. This research has implications for the shifting conceptual framework of social media advocacy to social media theory about advocacy and policy change. The results showed, in influencing the public service policy of the Population and Civil Registry Service (Dispendukcapil) of Blitar Regency, ICB went through several strategic stages starting from critical awareness, building relationships, actions, policy priorities shifting and controlling. The ICB management's actions as an advocate succeeded in influencing the administrative services policy which was realized with four new programs as well as efforts to improve public information disclosure regarding the administration's administration requirements. ICB has the power as well as a public pressure strategy or so-called people power which gives the effect of urging policy makers. For further researchers who want to research policy advocacy through social media, in order to examine other types of social media such as Twitter within the scope of the Indonesian state, because each platform has its own characteristics and uniqueness, the process and patterns of advocacy that occur will also be different.

Keywords: Social Media, Public Advocacy, Info Cegatan Blitar

PENDAHULUAN

Media sosial mampu mendorong representasi demokratis karena berhasil mendorong isu publik ketika mampu bertransformasi ke dalam sebuah aksi nyata sebagai upaya yang strategis untuk mengubah isu publik menjadi agenda politik (Galuh, 2016). Kehadiran media sosial turut berdampak pada perubahan sosial dengan memberikan kemudahan kepada penggunaannya dalam memperoleh informasi, serta dapat menyuarakan aspirasinya salah satunya untuk mendorong sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial komunitas tidak mungkin terjadi tanpa adanya proses komunikasi yang telah terkonsep, yang ditandai dengan adanya pesan bersama (agenda komunitas), jaringan komunikasi serta media yang dimanfaatkan (Lampe, 2018).

Efektivitas media sosial terhadap individu pada sebuah gerakan sosial dapat ditunjukkan dengan keterlibatan dalam aksi tersebut baik secara online maupun offline (Kapriani & Lubis, 2014). Mobilisasi komunitas dalam menjalankan roda organisasi yang memiliki peran di tengah masyarakat telah membentuk pola komunikasi yang khas, seperti yang terjadi pada organisasi non profit ICB. Grup media sosial yang aktif pada akun facebook sejak tanggal 31 Oktober 2013 ini awal mulanya berfungsi sebagai media berbagi informasi razia kelengkapan berkendara yang dilakukan pihak kepolisian.

Seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran konten informasi, saat ini bergeser menjadi perkumpulan yang bergerak di bidang sosial hingga terselenggara kopdar untuk membentuk pengurus dan koordinator di beberapa wilayah di Blitar untuk mempermudah koordinasi aksi atau penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara sederhana gerakan sosial (*social movement*) didefinisikan sebagai aktivitas sosial, berupa tindakan atau gerakan sekelompok individu, yang merupakan kelompok informal berbentuk organisasi atau individu dalam jumlah besar yang secara spesifik mengusung isu-isu sosial dan politik dengan melaksanakan, menolak atau mengkampanyekan gerakan sosial (Sukmana, 2016).

Media sosial telah melahirkan gerakan baru di tengah masyarakat yaitu penyaluran aspirasi yang dimobilisasi sehingga memberikan dampak yang lebih terasa daripada turun jalan secara fisik (Nurudin, 2015). Gerakan sosial mempunyai sebuah misi yang akan dicapai yang dirumuskan secara jelas serta terorganisir dan berkelanjutan (Hariyanti, 2017). Tidak jarang para pengguna media sosial menyuarakan kritik dan aduan terhadap kebijakan publik sebagai bentuk perlawanan (Andriana, 2013). ICB bertransformasi sebagai wadah

aspirasi maupun keluhan terhadap fasilitas dan pelayanan publik di kawasan Blitar raya sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan yang muncul merupakan salah satu wujud respons masyarakat berupa rasa ketidakpuasan terhadap sistem regulasi serta kebijakan publik (Surya, 2017). Sehingga melalui media sosial, masyarakat dapat terhubung dengan pembuat kebijakan. Kegiatan tersebut sebagai wujud gerakan demokrasi digital masyarakat guna mendorong perubahan pada kebijakan tertentu (Mustikaningsih, 2016). Gerakan demokrasi melalui piranti digital di tengah masyarakat mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam bentuk partisipasi masyarakat (Kompas.com, 21 Desember 2015).

Hal tersebut menjadi bukti bahwa media sosial bukan hanya dapat digunakan sebagai alat eksistensi diri namun sebagai bentuk kontrol terhadap penguasa atau dapat disebut sebagai media kritik sosial. Kritik sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi di tengah masyarakat yang memiliki tujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya suatu sistem sosial atau proses bermasyarakat (Oksinata, 2010). Peneliti lain menyatakan bahwa kritik sosial merupakan sebuah topik mengenai adanya ketidakadilan di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk menyindir pihak terkait agar keadilan sosial diperjuangkan (Setiawan, 2019). Aspirasi masyarakat berupa kritik dan saran terhadap fasilitas atau pelayanan publik merupakan bentuk kontrol sosial sesuai dengan visi dari organisasi tersebut. Karena melalui komunikasi secara online, tiap pengguna yang terlibat cenderung lebih berani mengungkapkan aspirasinya (Watie, 2016). Kontrol sosial yang dilakukan ICB adalah dengan mewedahi dan meneruskan aduan masyarakat terhadap kurangnya pelayanan publik kepada pemerintah, termasuk mengenai kurang efektifnya pelayanan administrasi kependudukan di bawah tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) di Kabupaten Blitar.

Chukuebuka berpendapat dalam (KAREEM & Ibidunni, 2019), media sosial juga telah menyediakan platform kritik sosial untuk memantau, kritik, bahkan mengekspos kegiatan ilegal lembaga pemerintah. Aduan dan kritikan masyarakat ke grup ICB mengenai pelayanan admindak memanas sejak tahun 2018. Terbukti sepanjang tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019 pemberitaan negatif pada media massa terhadap layanan Dispendukcapil yang dinilai sangat kurang, masyarakat mengeluhkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), selain harus menunggu antrian berjam-jam masyarakat harus rela bolak balik hingga empat kali untuk datang ke kantor Dispendukcapil yang berada di Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro. Karena

kecewanya terhadap pelayanan, salah satu anggota ICB mengunggah postingan berupasurat pengaduan dan permohonan dengar pendapat kepada komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar sebagai bentuk pengawalan dan pengawasan pelayanan publik di kabupaten Blitar sedangkan jawaban bupati Blitar menindaklanjuti sorotan dewan pada rapat paripurna dengan berjanji akan meningkatkan pelayanan dengan membangun 4 titik kantor pelayanan publik. Melihat respon dari target advokasi yakni pemerintah terhadap keluhan masyarakat dinilai kurang, admin ICB terus meloloskan informasi terkait keluhan tersebut.

Keluhan pelayanan adminduk masyarakat mulai meredam sejak awal tahun 2020, ketika akun atas nama LH yaitu sebagai Kepala Dpendukcapil Kabupaten Blitar akhirnya bergabung di ICB dan membuka percakapan untuk mengajak sharing admin ICB maupun masyarakat terkait pelayanan adminduk di Kabupaten Blitar. Di samping itu pemberitaan media massa terhadap pelayanan Dpendukcapil Kabupaten Blitar berangsur positif. Hal ini menunjukkan gerakan ICB berkontribusi terhadap perubahan kebijakan pelayanan adminduk di Kabupaten Blitar.

Walaupun ICB hadir sebagai media sosial yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjadi penyambung aspirasi masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya aktivitas menjadi penghubung aspirasi masyarakat saja tidak cukup untuk mendorong suatu perubahan (Simamora, 2018). Selain itu ICB, tidak dapat berdiri sendiri dengan melakukan aksinya secara online untuk mencapai tujuan utama advokasi kebijakan. Namun untuk dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dibutuhkan proses yang mendukung tercapainya kebijakan yang diinginkan, yakni melalui upaya secara online maupun offline (Simamora, 2018). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pengawalan perubahan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan Dpendukcapil Kabupaten Blitar yang dilakukan ICB. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif proses pengawalan perubahan kebijakan yang dilakukan *facebook* Info Cegatan Blitar (ICB) dalam mendorong evaluasi dan perubahan kebijakan pelayanan publik adminduk oleh Dpendukcapil Kabupaten Blitar. Ulasan secara komprehensif ini dapat dipaparkan berdasarkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yaitu diantaranya, ketua ICB, admin ICB, member ICB, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo, dan Kepala Dpendukcapil Kabupaten Blitar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada informan kunci. Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi sejak tahun 2019 salah satu tahap pra penelitian dengan menjadi member pasif ICB sejak tahun 2018. Pada awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Januari setelah mendapatkan topik dan permasalahan penelitian, peneliti melanjutkan kegiatan pra penelitian dengan menggali beberapa informasi penting yang terkait dengan topik penelitian dengan admin secara daring dan berkesempatan untuk menggali data kepada ketua ICB. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari hingga bulan April 2020. Selain itu penelitian ini dilengkapi dengan data sekunder yang berasal dari observasi secara *online* dalam kurun waktu tahun 2018 hingga awal tahun 2020 yang dilakukan peneliti pada akun *facebook* ICB dengan menggunakan kata kunci 'adminduk', 'e-KTP', dan 'KK' pada *tools* pencarian yang terdapat pada akun serta dilengkapi dengan studi dokumendari ICB berupa SK resmi dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), juga beberapa dokumen yang diperoleh dari Diskominfo dan Dpendukcapil Kabupaten Blitar. Peneliti juga melakukan observasi ke kantor Dpendukcapil Kabupaten Blitar guna mengetahui kondisi pelayanan adminduk pada tahun 2020 ini. Penelitian ini menggunakan beberapa narasumber sebagai informan kunci untuk dapat mengulas fenomena kontemporer tentang proses pengawalan perubahan kebijakan melalui *facebook* ICB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

ICB Sebagai Media Kontrol Sosial

Kini kehadiran media sosial menjadi alternatif baru, dimana setiap penggunaanya dapat menyampaikan berita atau opini dengan cepat dan umumnya disampaikan bebas tanpa adanya *gatekeeper* serta memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan media lainnya. Namun berbeda dengan grup atau komunitas yang besar dari media sosial Facebook ICB, yang mengklaim dirinya sebagai media kontrol sosial ini justru menggunakan *gatekeeper* untuk memfilter konten dan informasi yang masuk. Hal ini dilakukan semata untuk menjaga independensi serta menghindari konten yang mengandung SARA, pornografi, politik maupun informasi hoax.

Bentuk kontrol sosial yang dilakukan para pengurus ICB adalah dengan terus meloloskan aspirasi masyarakat baik berupa kritik dan saran terhadap fasilitas maupun pelayanan publik pemerintah Blitar. Tidak hanya

berhenti sampai disini, ICB akan meneruskan aduan dan aspirasi dari masyarakat kepada pihak pemerintah terkait yaitu melalui Diskominfo Kabupaten Blitar agar segera mendapat tindak lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

ICB Sebagai Gerakan Advokasi Kebijakan

Dalam menjalankan fungsinya ICB bukan sekedar sebagai media yang berfungsi sebagai saluran untuk saling berkomunikasi dan tukar informasi hal ini selaras dengan tujuan ICB dalam AD ART BAB II tentang asas dan tujuan, pada Pasal 5. Mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas menjadi landasan ICB melakukan aktivitas ini. Ketika terdapat kerusakan fasilitas publik atau pelayanan publik yang kurang memuaskan dan masyarakat telah melaporkan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait namun *feedback* yang diterima sangat minim. Namun ketika member memposting aduan tersebut melalui akun ICB, mendapatkan *feedback* lebih cepat berupa respon atau tindak lanjut dari pihak terkait.

Ketika melihat kurang tanggapnya respon, para admin dan moderator ICB yaitu bagian pengurus ICB dalam hal ini sebagai pihak advokator, menginginkan adanya sebuah tanggapan dari permasalahan ini, hingga akhirnya ICB melakukan sebuah gerakan yang tujuan akhirnya adalah menekan para pihak pemerintahan untuk mengevaluasi kebijakan terkait pelayanan publik.

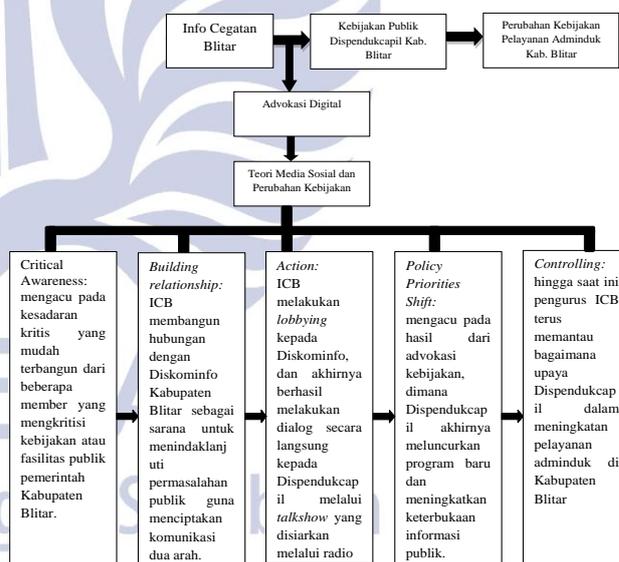
Organisasi Non Politik Berhasil Mempengaruhi Kebijakan Pelayanan Admindak Kabupaten Blitar

Secara keseluruhan, ICB bukan sekedar melaksanakan praktek kontrol sosial yang menjadi penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah, pada permasalahan admindak di Kabupaten Blitar bahkan telah melakukan praktek advokasi secara digital. Dalam mencapai misinya, pendekatan offline dan online harus digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan efektivitas upaya perubahan sosial. ICB sebagai gerakan advokasi, melakukan serangkaian proses baik secara online maupun offline. Dalam praktek advokasi kebijakan, ICB melewati beberapa tahap hal ini selaras dengan teori media sosial tentang advokasi dan perubahan kebijakan oleh Scott dan Maryman.

Tahapan pertama bermula dari *critical awareness*, yang mengacu pada kesadaran kritis yang mudah terbangun dari beberapa member yang mengkritisi kebijakan atau fasilitas publik pemerintah Kabupaten Blitar sehingga menstimulasi kesadaran kritis member lain. Jumlah member dan postingan yang sangat massif ini dapat mendorong timbulnya efek tekanan publik atau *people power* yang menjadi kekuatan tersendiri untuk menekan pembuat kebijakan. Sedangkan *building*

relationship, ICB membangun hubungan dengan Diskominfo Kabupaten Blitar sebagai sarana untuk menindaklanjuti permasalahan publik guna menciptakan komunikasi dua arah. Selanjutnya pada tahap *action*, ICB melakukan *lobbying* kepada Diskominfo, dan akhirnya berhasil melakukan dialog secara langsung kepada Dispendukcapil melalui *talkshow* yang disiarkan melalui radio. Tahap selanjutnya yaitu *policy priorities shift* mengacu pada hasil dari advokasi kebijakan, dimana Dispendukcapil akhirnya meluncurkan empat program baru sebagai upaya peningkatan pelayanan serta kepala Dispendukcapil secara terang-terangan bergabung pada grup ICB sehingga aduan maupun pertanyaan-pertanyaan terkait persyaratan pengurusan admindak sebagai bentuk upaya peningkatan keterbukaan informasi publik dalam berangsur menurun. Tahap terakhir yang dilakukan adalah *controlling* dan evaluasi hasil perubahan kebijakan Dispendukcapil. Bahkan sejak tahun 2020, menurut kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, ICB dijadikan sebagai barometer indeks kepuasan pelayanan administrasi dan kependudukan.

Gambar 1. Proses Advokasi ICB Terhadap Kebijakan Pelayanan Admindak Kabupaten Blitar



Sumber: diolah peneliti

PENUTUP

Simpulan

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak terhadap digitalisasi aktivitas advokasi kebijakan. Kehadiran ICB memberikan kontribusi dalam peningkatan proses demokrasi di era informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, jejaring media sosial lebih menarik perhatian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terhadap penetapan kebijakan oleh pemerintah. ICB berhasil mencapai tujuan akhir advokasi dengan

memberikan pengaruh pada Dispendukcapil Kabupaten Blitar untuk meningkatkan pelayanan adminduk. Bahkan mulai tahun 2020 ICB dijadikan sebagai barometer indeks kepuasan masyarakat mengenai pelayanan adminduk Dispendukcapil Kabupaten Blitar. Keberhasilan ICB dalam melakukan advokasi tidak terlepas dari beberapa tahapan baik secara *online* maupun *offline* yaitu diantaranya, *critical awareness*, *relationshipbuilding*, *action*, dan *policy priorities shift* serta *controlling & evaluasi*. Selain itu organisasi non profit ini memiliki kekuatan tersendiri dalam mendesak kebijakan dengan adanya tekanan publik atau disebut *people power*.

Secara teoritik penelitian ini memberi implikasi pada pergeseran yang terdapat pada kerangka konseptual advokasi media sosial pada teori media sosial tentang advokasi dan kebijakan dalam perkembangan tren gerakan advokasi melalui media sosial. Pergeseran konsep teoritik ini dapat digunakan untuk penelitian advokasi selanjutnya dalam lingkup media sosial. Kerangka konseptual dalam lingkup media sosial yang telah menjadi tren advokasi digital bahwa dalam mengubah sebuah kebijakan tidak selalu linear dengan skema pada teori tersebut. Organisasi satu dengan organisasi yang lain mungkin mengalami perbedaan dalam memproses atau mengamati timbal balik dalam hubungan antar model.

Saran

Advokasi kebijakan publik melalui media sosial lokal pada *facebook* Info Cegatan Blitar dapat dijadikan contoh untuk diterapkan akun *facebook* info cegatan pada kota lain sebagai bentuk partisipasi demokrasi sehingga media sosial lokal bukan hanya sebagai wadah saling tukar informasi namun juga terdapat praktek advokasi sebagai upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi serta meningkatkan kebijakan pemerintah. Dalam praktek kontrol sosial melalui aktivitas advokasi, ICB perlu untuk menciptakan mekanisme evaluasi dengan menetapkan tolok ukur yang dilengkapi dengan strategi yang sistematis sehingga dapat mengetahui kelemahan guna melahirkan sebuah inovasi serta mengetahui kekuatan kelompoknya sehingga dapat dioptimalkan. Namun aktivitas ini perlu didukung dengan adanya *handbook* yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas advokasi berikutnya agar lebih sistematis dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Andriana, N. (2013). Media Siber Sebagai Alternatif Jembatan Komunikasi Antara Rakyat Dan Pemimpinnya. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 79–93.

Galuh, I. G. A. A. K. (2016). Media Sosial sebagai

Strategi Gerakan Bali Tolak Reklamasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 73–92.

Hariyanti, P. (2017). Generasi Muda Muslim dan Gerakan Sosial Spiritual Berbasis Media Online. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 13(2), 165.

Kapriani, D. R., & Lubis, D. P. (2014). Efektifitas Media Sosial untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 160–170.

KAREEM, O. L., & Ibidunni, A. M. (2019). Social Media and Advocacy Communication Research: Trends and Implications. *Researchgate.Net*, August.

Lampe, I. (2018). Pola Komunikasi Gerakan Sosial Komunitas Sekitar Tambang Migas Tiaka: Refleksi Identitas Etnik Lokal. *Jurnal ASPIKOM*, 3(5), 860.

Mustikaningsih, W. (2016). *JURNAL REVIEW POLITIK / September 2016. 2015* (September), 1–19.

Nurudin. (2015). Media Sosial Sebagai Katarsis Mahasiswa. *Komunikator*, 7(2).

Oksinata, H. (2010). Kritik Sosial Dalam Kumpulan Puisi Aku Ingin jadi Peluru Karya Wiji Thukul (Kajian Resepsi Sastra). In *Universitas Sebelas Maret* (p. 33).

Setiawan, A. (2019). *PESAN KRITIK SOSIAL DALAM KOMIK BERGENRE HUMOR DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (ANALISIS ISI KUALITATIF DALAM AKUN @KOMIKLUKS)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.

Simamora, R. (2018). Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(1), 57–67.

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.

Surya, I. (2017). *MEDIA ONLINE, ADVOKASI, DAN GERAKAN SOSIAL Studi Kasus terhadap Manajemen Pemberitaan BaleBengong sebagai Advokasi Media dalam Isu Reklamasi Teluk Benoa*. Universitas Gadjah Mada.

Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.